

Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia

Anang Mukri, Harpen Yosmardi, Jamrizal, Ansori
Universitas Islam Batang Hari, Indonesia
Email: aanangmukri@gmail.com

Abstrak

Pendidikan sangat penting untuk keberlangsungan bangsa dan negara, jadi pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan terbaik kepada rakyatnya. Mutu pendidikan mengacu pada standar dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran dan hasil pendidikan memenuhi harapan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Di Indonesia, penjaminan mutu terpadu diterapkan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Kedua bentuk penjaminan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa menerima pendidikan yang tidak hanya merata tetapi juga memenuhi standar pendidikan nasional. Dalam hal pendidikan nasional, pendidikan Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan, terutama dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi persaingan global. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan mendukung kemajuan bangsa, terutama di era revolusi industri saat ini, di mana Indonesia harus bersaing dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan.

Kata kunci: *Kebijakan, jaminan, mutu, pendidikan.*

Abstract

Education is very important for the sustainability of the nation and state, so the government is responsible for providing the best education to its people. Education quality refers to the standards and criteria used to evaluate the extent to which the learning process and educational outcomes meet established expectations and needs. In Indonesia, integrated quality assurance is implemented in two forms, namely internal quality assurance and external quality assurance. These two forms of guarantee aim to ensure that all students receive an education that is not only equitable but also meets national education standards. Regarding national education, Indonesian education faces many challenges, especially in efforts to prepare human resources capable of facing global competition. Apart from that, developing high-quality human resources will support the nation's progress, especially in the current era of the industrial revolution, where Indonesia must compete with creativity, innovation, and speed.

Keywords: *policy, guarantee, quality, education.*

PENDAHULUAN

Bagi suatu negara, pendidikan adalah komponen penting dalam pembangunan. Mutu pendidikan menjadi kunci utama dalam menentukan keberhasilan sistem pendidikan suatu bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan. Dalam konteks ini, pendahuluan tentang mutu pendidikan adalah landasan untuk memahami konsep, pentingnya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan.

Pendidikan sangat penting untuk keberlangsungan bangsa dan negara, jadi pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan terbaik kepada rakyatnya (Fathurrochman, 2021). Pasal 11 butir (1) Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pemerintahan dan pemerintahan daerah harus memastikan setiap warganya memiliki akses pendidikan secara memadai tanpa diskriminasi.

Kebijakan adalah rencana atau pedoman yang dibuat oleh suatu pihak yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu (Dewi, 2021). Kebijakan biasanya bersifat formal, tertulis, dan mengikat. Kebijakan juga dapat berupa aturan, undang-undang, peraturan, atau keputusan yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terkait. Contoh suatu kebijakan diantaranya Kebijakan pemerintah

tentang pajak, subsidi, anggaran, atau pembangunan. Kebijakan perusahaan tentang gaji, tunjangan, jam kerja, atau kode etik. Kebijakan sekolah tentang kurikulum, absensi, nilai, atau disiplin. Dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 Allah berfirman.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: "Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat".

Mutu pendidikan mengacu pada standar dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran dan hasil pendidikan memenuhi harapan dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya mencakup aspek akademik seperti pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga aspek non-akademik seperti karakter, moral, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan kehidupan.

"Mutu pendidikan" berasal dari kata "kualitas" dan "pendidikan", yang berarti bahwa itu menunjukkan kualitas produk yang dihasilkan oleh institusi pendidikan atau sekolah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa berprestasi, baik dalam hal akademik maupun non akademik, dan yang lulus dengan tujuan (Siahaan et al., 2023). Menurut kebijakan di atas, pemenuhan input dan output tidak cukup untuk memberikan pendidikan berkualitas. Proses-proses seperti pengambilan keputusan, pengelolaan kegiatan, pengelolaan instansi, pendidikan, dan monitoring dan evaluasi adalah yang paling penting. Belajar mengajar adalah yang paling penting di antara proses-proses lainnya.

Mutu pendidikan mengacu pada standar, kualitas, dan efektivitas kegiatan pembelajaran serta hasil yang diraih peserta didik. Konsep mutu pendidikan tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga aspek non-akademis seperti keterampilan sosial, emosional, dan karakter. Dalam Qur'an Surah Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman.

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

Artinya: "Dialah (Tuhan) yang menjadikan kematian dan kehidupan, untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia Mahaperkasa, lagi Maha Pengampun".

Di Indonesia, penjaminan mutu terpadu diterapkan dalam dua bentuk, yaitu penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Kedua bentuk penjaminan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua siswa menerima pendidikan yang tidak hanya merata tetapi juga memenuhi standar pendidikan nasional (Dewi, 2021). Kebijakan internal dan eksternal akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di negara ini.

Beberapa indikator penting dalam menilai mutu pendidikan termasuk:

1. Standar Akademis: Ini mencakup pemahaman dan penguasaan materi pelajaran, kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kreatif, serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi dunia nyata.
2. Kualitas Pengajaran: Kualitas guru, metode pengajaran yang digunakan, dan dukungan yang diberikan kepada siswa untuk memfasilitasi pembelajaran yang efektif.
3. Relevansi Kurikulum: Keterkaitan kurikulum dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan perkembangan global, serta kemampuannya untuk mempersiapkan siswa untuk tantangan masa depan.
4. Sarana dan Prasarana: Ketersediaan fasilitas fisik dan teknologi yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran, termasuk bangunan sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan akses internet.

5. Orang tua dan masyarakat yang terlibat: Peran orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak-anak, termasuk dukungan emosional, motivasi, dan partisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan.
6. Evaluasi dan Pemantauan: Sistem evaluasi yang efektif untuk mengukur kemajuan siswa, mengevaluasi kinerja guru dan lembaga pendidikan, serta memantau keberhasilan program pendidikan secara keseluruhan.
7. Inklusivitas dan Keadilan: Pendidikan yang bermutu harus dapat dijangkau oleh semua kalangan tanpa perbedaan berdasarkan latar belakang ekonomi, jenis kelamin, agama, atau kecacatan.

Pendidikan adalah sistem dan proses yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang dinilai dan dianggap paling ideal (Temon Astawa, 2021). Meningkatkan mutu pendidikan membutuhkan upaya lintas sektor dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan sektor swasta. Investasi dalam pembinaan guru, pengembangan kurikulum yang relevan, perbaikan infrastruktur pendidikan, dan penguatan sistem evaluasi adalah beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Mentransfer pengetahuan, keterampilan, nilai, dan norma kepada seseorang dikenal sebagai pendidikan. Ini dicapai melalui penggunaan berbagai strategi dan pendekatan pembelajaran. Lebih dari sekadar proses akademis, pendidikan juga membentuk kepribadian, karakter, dan kemampuan adaptasi individu terhadap lingkungan sosialnya.

Pendidikan memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia: Tujuan pendidikan adalah membantu seseorang mengembangkan potensi yang ada dalam diri secara optimal, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan pembangunan negara.
2. Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Pendidikan mampu menekan angka kemiskinan, ketimpangan, dan ketidaksetaraan di masyarakat dengan memberikan kesempatan yang lebih untuk mengenyam pendidikan bagi semua individu.
3. Pembentukan Karakter dan Moral: Pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan moral individu. Pendidikan memainkan peran penting dalam memperkuat nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi.
4. Peningkatan Daya Saing dan Inovasi: Melalui pendidikan, individu diberi kesempatan untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja global yang semakin kompetitif. Pendidikan juga mendorong inovasi dan kreativitas yang merupakan kunci untuk kemajuan dan perkembangan.
5. Pemahaman dan Toleransi Antarbudaya: Pendidikan memainkan peran penting dalam mempromosikan pemahaman, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman budaya, agama, dan nilai-nilai di antara individu.

Pendidikan dapat dilihat dalam berbagai konteks, mulai dari pendidikan formal seperti halnya sekolah dan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, hingga pendidikan non-formal dan informal seperti pelatihan kerja, kursus online, dan pembelajaran mandiri. Tujuan utamanya tetap sama, yaitu memberikan individu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk sukses dalam kehidupan pribadi, profesional, dan sosial mereka.

Problem kualitas di dunia pendidikan memengaruhi nilai jual suatu institusi pendidikan (Gusti & Masduki, 2022). Kualitas pembelajaran, fasilitas dan prasarana, guru dan siswa, dan hasil belajar semuanya menjadi sangat bergantung pada prestasi dan prestise lembaga. Pendidikan memiliki nilai jual dan ketertarikan untuk masuk jika lulusan berkualitas tinggi. Sebaliknya, jika lulusan berkualitas rendah, minat dan daya serap juga rendah.

Sebuah institusi pendidikan yang memiliki sistem penjaminan mutu yang berfungsi dengan baik akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung (Fadhli, 2020). Ada dampak langsung dan tidak langsung dari sistem penjaminan mutu, yang biasanya diterapkan melalui audit yang ketat. Keterbukaan, pembelajaran yang efektif, peningkatan status, dan integrasi sosial lembaga adalah dampak langsungnya; dampak tidak langsungnya termasuk motivasi, hubungan organisasi yang baik, dan lainnya.

Pentingnya mutu pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk:

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia:** Mutu pendidikan yang tinggi membantu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang menjadi fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan yang berkualitas memberikan individu kemampuan untuk berpikir kritis, berinovasi, dan berkontribusi secara positif terhadap masyarakat dan ekonomi.
2. **Peningkatan Daya Saing Global:** Di tengah persaingan global, pendidikan yang berkualitas menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing suatu negara. Negara-negara yang memiliki sistem pendidikan yang efektif dan mutu pendidikan yang tinggi cenderung lebih mampu bersaing di pasar global.
3. **Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan:** Pendidikan berkualitas memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dengan memberikan akses yang adil dan berkualitas terhadap pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, negara dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan mobilitas sosial.
4. **Pembentukan Warga Negara yang Bermoral dan Bertanggung Jawab:** Pendidikan yang berkualitas tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga individu yang memiliki nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang tinggi. Hal ini penting untuk membangun masyarakat yang beradab dan harmonis.
5. **Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan** sangatlah beragam, termasuk kualifikasi guru, kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan yang efektif sangatlah penting untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Pembahasan dan Analisis

Permasalahan dalam Kebijakan Mutu Pendidikan

Kebijakan pendidikan di Indonesia diatur oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Kebijakan pendidikan tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki akses yang adil ke pendidikan berkualitas.

Beberapa poin utama kebijakan pendidikan di Indonesia meliputi:

1. **Wajib Belajar 12 Tahun:** Pemerintah Indonesia mewajibkan setiap anak Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan dasar selama 12 tahun, terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar (SD/MI) dan 3 tahun pendidikan menengah pertama (SMP/MTs), serta 3 tahun pendidikan menengah atas (SMA/MA) atau pendidikan kejuruan.
2. **Kurikulum Nasional:** Pemerintah menetapkan kurikulum nasional yang harus diikuti oleh sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Kurikulum tersebut diperbarui secara berkala untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan terkini.
3. **Pengembangan Kompetensi Guru:** Kebijakan pendidikan juga mencakup pengembangan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi guna meningkatkan kualitas pengajaran.
4. **Pemerataan Pendidikan:** Kebijakan pendidikan berupaya mengatasi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan dengan menyediakan akses pendidikan yang merata, termasuk melalui program bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
5. **Pendidikan Vokasi:** Pemerintah juga mendorong pengembangan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan yang siap kerja dan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri.
6. **Digitalisasi Pendidikan:** Dalam era digital, pemerintah berupaya meningkatkan akses pendidikan melalui teknologi, seperti penggunaan e-learning, perangkat pembelajaran digital, dan infrastruktur internet di sekolah-sekolah.
7. **Penguatan Karakter:** Kebijakan pendidikan di Indonesia juga menekankan pentingnya penguatan karakter siswa, termasuk nilai-nilai moral, etika, keagamaan, dan nasionalisme.
8. **Program Bantuan Pendidikan:** Pemerintah menyediakan berbagai program bantuan pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), untuk membantu siswa yang membutuhkan.
9. **Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Tinggi**:** Pemerintah bekerja untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh lebih banyak orang.

Suatu pendidikan dikatakan bermutu apabila melampaui Standar Nasional Pendidikan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Gusti & Masduki, 2022). Ruang lingkup SNP diantaranya Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian Pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan terdiri dari dua bagian: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) (Am, 2022). Di Indonesia, kebijakan penjaminan mutu pendidikan telah mengalami sejumlah tantangan dan masalah.

Beberapa di antaranya termasuk:

1. Ketimpangan Mutu Pendidikan: Masalah ini terkait dengan ketidakmerataan mutu pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Pendidikan di daerah perkotaan umumnya cenderung lebih baik daripada di daerah pedesaan. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di berbagai wilayah.
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana: Banyak sekolah di Indonesia masih kekurangan fasilitas dasar seperti gedung yang layak, peralatan pembelajaran yang memadai, dan buku teks. Kondisi ini mempengaruhi proses pembelajaran dan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
3. Kurangnya Kualifikasi Guru: Meskipun pemerintah telah berusaha meningkatkan kualifikasi guru melalui program pelatihan dan sertifikasi, masih banyak guru yang belum memiliki kualifikasi yang memadai. Kurangnya kualifikasi guru dapat mempengaruhi mutu pembelajaran di kelas.
4. Kurikulum yang Kurang Relevan: Kurikulum pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja dapat mengurangi efektivitas pendidikan. Pembaruan kurikulum yang terlambat atau kurang fleksibel juga dapat menjadi hambatan bagi peningkatan mutu pendidikan.
5. Pengawasan dan Evaluasi yang Tidak Efektif: Pengawasan terhadap proses pembelajaran dan evaluasi mutu pendidikan seringkali tidak efektif atau tidak konsisten di semua tingkatan pendidikan. Kurangnya mekanisme pengawasan yang kuat dapat mengakibatkan penyimpangan dalam implementasi kebijakan pendidikan.
6. Perubahan Kebijakan yang Terlalu Sering: Seringkali terjadi perubahan kebijakan pendidikan yang drastis dari pemerintah, tanpa memberikan waktu yang cukup bagi lembaga pendidikan dan para stakeholder untuk menyesuaikan diri. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dan kesulitan dalam implementasi kebijakan.
7. Keterlibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan: Masalah ini berkaitan dengan kurangnya keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses penjaminan mutu pendidikan. Partisipasi yang kurang dapat menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah, pendidik, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan terkait untuk bekerja sama dalam merancang dan melaksanakan kebijakan penjaminan mutu pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Upaya kolaboratif ini harus didukung oleh alokasi sumber daya yang memadai, pembaruan sistem pendidikan, peningkatan kualifikasi guru, serta peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pendidikan.

Urgensi Mutu Pendidikan di Indonesia

Diharapkan bahwa setiap sekolah atau madrasah dapat mengikuti kegiatan akreditasi untuk mengevaluasi kelayakan dan kualitas satuan atau program pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dianggap bermutu jika memenuhi atau melampaui standar pendidikan yang sudah ditentukan (Astuti & Diantoro, 2021). Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas guru, meskipun peran guru sangat penting dalam proses pembelajaran (Wijaya et al., 2021). Urgensi kebijakan penjaminan mutu pendidikan di Indonesia sangatlah penting dan mendesak.

Beberapa alasan kebijakan ini penting adalah sebagai berikut: sistem penjaminan mutu internal adalah sistem yang memiliki input, proses, dan output secara bersamaan; atau sistem yang memulai dari tujuan pendidikan hingga hasil belajar (Riva'i et al., 2022).

Pada abad ke-21, persaingan dalam dunia pendidikan semakin meningkat. Akibatnya, institusi pendidikan harus lebih cepat dan tepat dalam memberikan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan

siswa yang dibutuhkan oleh sekolah dan masyarakat umum, khususnya di dunia (Aziz, 2023), namun juga harus sesuai dengan era masyarakat 5.0, atau revolusi Industri 4.0. Ini adalah tanggung jawab besar pemerintah dalam hal sektor pendidikan. Untuk membuat sumber daya manusia yang siap menghadapi globalisasi, peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas utama.

Dalam hal pendidikan nasional, pendidikan Indonesia saat ini menghadapi banyak tantangan, terutama dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi persaingan global. Selain itu, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan mendukung kemajuan bangsa, terutama di era revolusi industri saat ini, di mana Indonesia harus bersaing dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan.

Beberapa hal yang menjadi urgensi mutu pendidikan diantaranya:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia: Pendidikan yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan meningkatkan mutu pendidikan, Indonesia dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif, dan inovatif, yang akan membantu meningkatkan daya saing dan produktivitas bangsa dalam skala global.
2. Menjawab Tantangan Global: Di era globalisasi saat ini, persaingan antarnegara semakin ketat. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tuntutan pasar global sangatlah penting. Penjaminan mutu pendidikan dapat membantu mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk bersaing secara global.
3. Mengurangi Ketimpangan Sosial dan Ekonomi: Pendidikan berkualitas memiliki potensi untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian, kebijakan penjaminan mutu pendidikan dapat membantu mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.
4. Mendukung Pembangunan Berkelanjutan: Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu elemen kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Melalui penjaminan mutu pendidikan, Indonesia dapat menciptakan tenaga kerja yang terampil dan terdidik, meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan hidup, serta mempromosikan nilai-nilai keberlanjutan dalam masyarakat.
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Pendidikan berkualitas memiliki dampak yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Lulusan pendidikan yang berkualitas cenderung memiliki peluang kerja yang lebih baik, pendapatan yang lebih tinggi, serta tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi secara keseluruhan.
6. Mendukung Pembangunan Nasional: Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang vital bagi pembangunan nasional. Dengan meningkatkan mutu pendidikan, Indonesia dapat menciptakan pondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan kemajuan sosial yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan urgensi tersebut, pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan terkait harus bekerja sama untuk merancang, melaksanakan, dan memantau kebijakan penjaminan mutu pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Hal ini akan menjadi langkah penting dalam memastikan masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara Indonesia.

KESIMPULAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu negara, dan kualitas pendidikan menjadi kunci untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan. Namun, di Indonesia, masih terdapat sejumlah permasalahan yang memengaruhi mutu pendidikan, termasuk ketimpangan antarwilayah, kurangnya kualifikasi guru, keterbatasan sarana dan prasarana, serta evaluasi dan pengawasan yang tidak efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya kebijakan penjaminan mutu pendidikan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kebijakan mutu pendidikan di Indonesia tidak hanya penting, tetapi juga mendesak. Hal ini karena mutu pendidikan yang tinggi memiliki dampak yang luas, termasuk meningkatkan daya saing global, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta membentuk generasi muda yang berintegritas dan berkompeten. Melalui kebijakan yang tepat, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk

meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh, sehingga menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Am, S. (2022). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Dalam Rangka Meningkatkan Mutu Sekolah. *JIECO: Journal of Islamic Education Counseling*, 2(1), 30–43.
- Astuti, P. Y., & Diantoro, F. (2021). Evaluasi Sekolah dan Madrasah Melalui Sistem Akreditasi dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, VII(2), 149–164. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v6i2.4282>
- Aziz, S. M. (2023). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(1), 1063–1073.
- Dewi, M. K. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan. *INTIZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 1–3. <http://www.uinjkt.ac.id/id/kualitas-pendidikan-di-indonesia-masih->
- Fadhli, M. (2020). Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Eksternal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 53–65. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2.1148>
- Fathurrochman, I. (2021). Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Perspektif Zonasi Mutu. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 9(3), 234. <https://doi.org/10.29210/164800>
- Gusti, G., & Masduki, M. (2022). Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10724>
- Riva'i, F. A., Rizal, S., & Septiani, D. (2022). Sistem Penjaminan Mutu Internal Terhadap Mutu Pendidikan di SDN Situ Ilir 1 Cibungbulang Bogor. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(4), 1320–1327. http://jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/367
- Siahaan, A., Akmalia, R., Ray, A. U. M., Sembiring, A. W., & Yunita, E. (2023). Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Journal on Education*, 5(3), 6933–6941. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1480>
- Temon Astawa, I. N. (2021). Pendidikan Agama Dan Keagamaan Dalam Menunjang Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 7(2). <https://doi.org/10.25078/jpm.v7i2.2776>
- Wijaya, C., Nasution, T., Al Qadri, M., Fuadi, A., & Anwar, K. (2021). Persepsi Guru RA Ali Mahfudz tentang Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 738–751. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i2.1551>